

# **RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Atas berkah rahmat Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillah Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 berhasil kami susun. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2022, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2022 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 masih mengacu kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Semoga Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2022. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Banjarnegara, 14 September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



## **DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7

### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas komunikasi dan Informatika .....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika .....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas komunikasi dan Informatika .....	23
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	33
2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD .....	33

### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas komunikasi dan Informatika .....	34
3.3. Program dan Kegiatan .....	36

### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

4.1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan	43
--	----

Informatika .....	
4.2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik .....	44
4.3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian .....	44
<b>BAB V : PENUTUP</b>	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Dinas komunikasi dan Informatika, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas komunikasi dan Informatika. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Dinas komunikasi dan Informatika (Renja Dinas komunikasi dan Informatika) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Dinas komunikasi dan Informatika untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas komunikasi dan Informatika, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas komunikasi dan Informatika dan RKPD.

Penyusunan Renja Dinas komunikasi dan Informatika Tahun 2022 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum Dinas komunikasi dan Informatika/lintas Dinas komunikasi dan Informatika, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada

Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Dinas komunikasi dan Informatika dan RKPD, penyusunan Renja Dinas komunikasi dan Informatika juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi terkait. Renja Dinas komunikasi dan Informatika adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

## **1.2. Landasan Hukum**

Renja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

- Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  28. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 27).
  29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 64)

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan Renstra Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017–2022 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2022 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2022 dan

- Renja Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2022;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas komunikasi dan Informatika, serta sistematika dokumen Renja Dinas komunikasi dan Informatika.

#### **BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas komunikasi dan Informatika tahun lalu dan capaian Renstra Dinas komunikasi dan Informatika, analisis kinerja pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas komunikasi dan Informatika, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

**BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas komunikasi dan Informatika, serta program dan kegiatan tahun 2022.

**BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Dinas komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Dinas komunikasi dan Informatika dan sasaran RKPD.

**BAB 5 : PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas komunikasi dan Informatika**

Rencana Kerja (Renja) Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas komunikasi dan Informatika. Urusan yang menjadi kewenangan Dinas komunikasi dan Informatika meliputi Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Renja Dinas komunikasi dan Informatika Tahun 2020 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 terdiri dari 10 program, 29 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.115.000.487.000,-, dengan fokus utama pada Membanun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta penyiaran melalui transformasi digital. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Belum optimalnya website yang dikelola OPD
2. Belum optimalnya PPID di OPD
3. Pengembangan program SATU DATA belum optimal
4. Infrastruktur persandian belum optimal

Dari 10 program dan 29 kegiatan yang ada dalam Renja Dinas komunikasi dan Informatika tersebut, program/kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 10 program, 23 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.258.968.544,-.

Pada Perubahan Renja Dinas komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan

atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Dinas komunikasi dan Informatika menjadi 10 program 29 kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 3.652.055.09,- Pada Perubahan Renja Dinas komunikasi dan Informatika tahun 2020, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pembuatan Kalender Pembangunan Banjarnegara, Program kerjasama Informasi dengan Mas Media, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2020 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Dinas komunikasi dan Informatika. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampaian target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada. Beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :

1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika;
  2. Kurangnya pembinaan pada pengelola WEB OPD;
  3. Kurang dukungan Anggaran yang memadai di tingkat OPD;
  4. Belum adanya aplikasi pelaporan data sektoral yang terintegrasi secara terpadu;
  5. Belum optimalnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Sandi dan Telekomunikasi.
- 
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Pelayanan Adminitrasi perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dan Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan informatika dengan pihak-pihak terkait baik di daerah, provinsi maupun pusat terkait regulasi yang ada.
2. Sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pendampingan Dinas Komunikasi dan informatika terkait kegiatan penyebarluasan informasi yang dilaksanakan.
3. Kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan yang mendukung kegiatan di bidang pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas layanan public.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka (*jelaskan implikasi dari poin di atas*). Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Kerja sama dengan pihak terkait (Organisasi/lembaga TIK lain di luar Pemda);
3. Dukungan Anggaran guna pengembangan E-Government di masing-masing OPD;
4. Mengupayakan tersedianya aplikasi pelaporan data sektoral;
5. Mengupayakan adanya kegiatan untuk peningkatan kapasitas bagi SDM pengelola sandi dan telekomunikasi.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas komunikasi dan Informatika sampai dengan Tahun 2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas komunikasi dan Informatika  
 s.d. Tahun 2021\* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas komunikasi dan Informatika) Tahun 2022	Realisa si Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja Dinas komunikasi dan Informatika s/d tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas komunikasi dan Informatika s/d tahun 2021	
					Target Renja Dinas komunikasi dan Informatika tahun 2020	Realisasi Renja Dinas komunikasi dan Informatika tahun 2020	Tingka t Realisa si (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7 / 6	(9)	(10)=5+7 +9	(11)=10 /4
2.	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>									
2.16	<b>Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika</b>									
2.16.01	<b>Program Penunjang</b>									

	<b>Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>								
2.16.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika</i>								
2.16.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas komunikasi dan Informatika	Prosentase tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas komunikasi dan Informatika	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%
2.16.01.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Dinas komunikasi dan Informatika</i>								
2.16.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji ASN pada Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Terpenuhinya kebutuhan pembayaran pengelola keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.16.01.2.06	<i>Administrasi Umum Dinas komunikasi dan Informatika</i>								
2.16.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistic kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>								
2.16.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase terpenuinya pembayaran telepon dan litrik pada Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pembayaran gaji PTT dan THL pada Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.09 .	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>								
2.16.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun dan terpenuinya pembayaran pajak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Operasional atau Lapangan	STNK kendaraan dinas/operasional								
2.16.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.01.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.02	<b>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>									
2.16.02.2.01	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Proentase diseminasi informasi bagi masyarakat								
2.16.02.2.01 .02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Prosentase pengelolaan website banjarnegarakab.go.id, media social dan aplikasi pelaporan/aduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.02.2.01 .04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Majalah Derap Serayu, Baliho sosialisasi kemasyarakatan, kalender Pembangunan Banjarnegara Tahun 2023 dan Buku Kaleideskop	1 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan

		Pembangunan Banjarnegara 2021							
2.16.02.2.01 .05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi dengan masyarakat yang dikelola	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis
2.16.02.2.01 .06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen jaringan komunikasi dan informasi	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen
2.16.02.2.01 .07	Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya jumpa pers, iklan di media massa, televise dan feature nasional	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	4 kegiatan
2.16.02.2.01 .12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan
2.16.03	<b><i>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</i></b>								
2.16.03.2.01	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>								
2.16.03.2.01 .03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya fasilitasi jaringan e-government, system berbasis online dan fasilitas umum							
2.16.03.2.02	<i>Pengelolaan</i>								

	<i>e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>									
2.16.03.2.02 .01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kajian dan pengawasan menara yan dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.03.2.02 .02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya dokumen kebijakan SPBE	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	4 dokume n
2.16.03.2.02 .07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedia lisensi jasa penunjang (support TNDE, basis data IBM domino, Linux Redhat Enterprises, Sophos, IP ublik, aplikasi zoom	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16.03.2.02 .10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terpeliharanya jaringan e-government	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.20	<b>Statistik</b>									
2.20.02	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	Prosentase tersedianya data sektoral kabupaten								
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan									

	<i>Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>								
2.20.02.2.01 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersusunnya data statistik sektoral	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis
2.21	<b>Persandian</b>								
2.21.02	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	Prosentase terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengamanan informasi pada OPD							
2.21.02.2.01	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>								
2.21.02.2.01 .03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terpeliharanya peralatan persandian dan komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika**

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Dinas komunikasi dan Informatika mengampu 6 (enam)Indikator. Dari 6 indikator tersebut, 5 berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Kesiapan aplikasi dan data dukungnya untuk bisa diintegrasikan mengakibatkan masih sedikitnya aplikasi pelayanan public yan terintegrasi

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Mengupayakan penyesuaian data-data pendukun aplikasi agar siap unuk diintegrasikan

Kinerja pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara**

No	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Dinas komunikasi dan Informatika				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Percentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		IKK LPPD	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Percentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		IKK LPPD	28	28	30	32		6,82	10	15	
3	Percentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten		IKK LPPD					63,25	63,25	70	75	

4	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		IKK LPPD	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		IKK LPPD	100	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah		IKK LPPD	100	100	100	100	100	100	100	

\*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas komunikasi dan Informatika**

Dinas komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 3 (tiga) urusan, yaitu Komunikai dan informatika, Statistik dan Persandian. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas komunikasi dan Informatika untuk tahun 2022 mencakup ketiga urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas komunikasi dan Informatika diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi dan peningkatan pelayanan Dinkominfo kepada OPD
2. Belum optimal pelaksanaan dan pengembangan e-government dalam rangka menunjang pelayanan publik dan pencapaian Indeks SPBE sesuai standard nasional.
3. Belum optimalnya pelaksanaa persandian dan penyediaan data staistik untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjarnegara

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Terhambatnya pemenuhan kebutuhan data dan informasi
2. Masih rendahnya Nilai Indeks SPBE yang berdampak pada Indeks Reformasi Birokrasi
3. Tingkat keamanan informasi belum terukur

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Perkembangan teknologi informasi yang mengharuskan pelayanan public secara online mengakibatkan Dinas

Komunikasi dan Informatika selalu meningkatkan kualitas pelayanan di bidang teknologi informasi.

2. Kemudahan masyarakat membuka akses informasi melalui medsos menuntut Dinas Komunikasi dan informatika untuk memberikan informasi yang benar dan dibutuhkan masyarakat.
3. Kebutuhan data dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan memerlukan terbangunnya system/aplikasi data yan terintegrasi.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangn tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2022 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2021. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas komunikasi dan Informatika pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pelaksanaan SPBE
2. Menmbangun Satu Data Indonesia Daerah
3. Meningkatkan keamanan informasi dan aplikasi
4. Meningkatkan pelayanan pengelolaan pengaduan dan informasi

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPJMD Tahun 2017-2022. Dalam RPJMD Tahun 2017-2022, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Dinas komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 meliputi:

1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan melalui pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara dan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.

Tabel 2.3  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Catatan Penting	
							Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
2	16	01			Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika							
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
2	16	01	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2	16	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	1.374.500	Dinkominfo	APBD		

					<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Dokumen	1.374.500	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	02		<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>						
2	16	01	02	01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Terpenuhinya pembayaran gaji ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara	100%	3.022.041.427	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	02	03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pembayaran pengelola keuangan OPD	100%	72.738.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	06		<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>						
2	16	01	06	02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	4.997.200	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	06	04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Tersedianya bahan logistik kantor	100%	146.615.800	Dinkominfo	APBD	

2	16	01	06	06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Tersedianya surat kabar/majalah	100%	24.600.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	08		<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>						
2	16	01	06	02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Prosentase terpenuhinya pembayaran telepon dan listrik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara	100%	64.800.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	08	04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Terpenuhinya pembayaran gaji PTT dan THL pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara	100%	211.042.893	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	09		<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>						

2	16	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun dan terpenuhinya pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional	100%	57.173.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun	100%	16.977.480	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeiharanya perlengkapan gedung kantor	100%	14.900.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	02			<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>						
2	16	02	01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						
2	16	02	01	02	<i>Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>	Persentase pengelolaan website banjarnegarakab.go.id, media sosial dan aplikasi pelaporan/aduan masyarakat	100%	25.083.200	Dinkominfo	APBD	

2	16	02	01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Majalah Derap Serayu online, Baliho sosialisasi kemasyarakatan	1 kegiatan	23.474.400	Kab. Banjarnegara	APBD	
2	16	02	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi dengan masyarakat yang dikelola	1 Jenis	154.387.000	Kab. Banjarnegara	APBD	
2	16	02	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen jaringan komunikasi dan informasi	3 dokumen	3.105.600	Dinkominfo	APBD	
2	16	02	01	07	Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya jumpa pers, iklan di media massa, televisi dan feature nasional	4 kegiatan	28.159.300	Dinkominfo	APBD	
2	16	02	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah	2 kegiatan	5.323.200	Dinkominfo	APBD	
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika						

2	16	03	01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								
2	16	03	01	03	<b>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</b>	Prosentase terpenuhinya fasilitasi jaringan e-government, sistem berbasis online dan fasilitas umum	100% (11 bln)	1.069.660.000	Kab. Banjarnegar	APBD	Langganan internet baru teranggarkan 10 bulan		
2	16	03	02		<b>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								
					Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kajian dan pengawasan menara yang dilaksanakan	100%	10.602.100	Kab. Banjarnegar	APBD			
					Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya dokumen kebijakan SPBE	1 dokumen	50.563.000	Dinkominfo	APBD			

2	16	03	02	07	<i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	Tersedia lisensi layanan penunjang (support TNDE, basis data IBM Domino, Linux Redhat Enterprises, Sophos, IP Publik, aplikasi zoom)	100%	225.350.000	Kab. Banjarnegar	APBD		
2	16	03	02	10	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	Pembuatan command center dan jumlah titik jaringan yang dapat dikembangkan dan dipelihara	2 kegiatan	181.429.500	Kab. Banjarnegar	APBD		
2	20				<b>Statistik</b>							
2	20	02			<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>							
2	16	02	01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	- Tersusunnya data statistik sektoral '- Jumlah aplikasi statistik sektoral yang tersedia	- 3 jenis data '- 1 jenis aplikasi	28.420.900	Dinkominfo	APBD		
2	21				<b>Persandian</b>							
2	21	02			<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>							

2	21	02	01	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>							
				<i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	Jumlah alat persandian dan komunikasi yang sesuai perkembangan teknologi	1 set	21.625.000	Kab. Banjarnegara	APBD		
							<b>5.465.818.000</b>				

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2022, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Pemantapan pelaksanaan SPBE tidak bisa dilaksanakan dengan optimal dikarenakan alokasi angaran yang terbatas
2. APBD Tahun 2022 di Dinas Komunikasi dan Informatika hanya untuk membiayai kegiatan operasional yang bersifat wajib

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas komunikasi dan Informatika. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

## **2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas komunikasi dan Informatika. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2022 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	NIHIL				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” yang diturunkan dalam tujuh (7) prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan tema tersebut, Rencana Kerja Dinas komunikasi dan Informatika dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional diantaranya Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan program prioritas sebagai berikut :

- a. Infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Infrastruktur ekonomi;
- c. Infrastruktur perkotaan;
- d. Energi dan ketenagalistrikan;
- e. Transformasi digital.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri mendukung tiga (3) dari tujuh (7) Prioritas Pembangunan Nasional tersebut, yakni Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dan Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017-2022, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan dalam Rencana Kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan good governance.
2. Meningkatkan Pendayagunaan e-Goverment menuju Banjarnegara Smart City.
3. Meningkatkan pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi di lingkungan OPD Pemerintah Kab. Banjarnegara.
4. Meningkatkan Pelaksanaan persandian dan penyedian data statistik untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sehingga bisa mendukung semua program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah;
  - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan system komunikasi dan Informatika berbasis teknologi informasi modern;
  - c. Terlaksananya penyusunan petunjuk teknis / pedoman dibidang komunikasi dan Informatika untuk menunjang peningkatan pelayanan publik yang baik dan proporsional.

Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan fokus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan public dan akuntabilitas Dinas komunikasi dan Informatika.
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatnya deseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik.
4. Meningkatnya Ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.

5. Meningkatnya kualitas pelayanan persandian :
  - a. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat dibidang kominfo serta terjalin kerjasama informasi dengan media massa;
  - b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi untuk kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang;
  - c. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur Komunikasi dan Informatika.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 sebagai berikut :

## Program dan Kegiatan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2 16			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						5,545,444,100				9,027,851,600		
2 16 01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						3,656,853,000				4,247,000,000		
2 16 01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika						8,749,000				25,000,000		
2 16 01	2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas komunikasi dan Informatika		Tersusunnya dokumen perencanaan Dinas komunikasi dan Informatika		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		4,374,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2 16 01	2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 dokumen		4,374,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2 16 01	2.0 2		<b>Administrasi Keuangan Dinas komunikasi dan Informatika</b>						3,094,722,627				3,350,000,000		
2 16 01	2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya pembayaran gaji ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		3,021,984,627	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2 16 01	2.02 03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Prosentase terpenuhinya kebutuhan pembayaran pengelola keuangan OPD		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		72,738,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
2 16 01	2.0 6		<b>Administrasi Umum Dinas komunikasi dan Informatika</b>						216,888,000				392,000,000		

## Program dan Kegiatan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil						
216 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		4,997,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12,000,000	
216 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya bahan logistik kantor		Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		187,290,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000	
216 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Tersedianya surat kabar/majalah		Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		24,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000	
216 01 2.08 02	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								247,442,893				330,000,000	
216 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya pembayaran telpon dan listrik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		64,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80,000,000	
216 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terpenuhinya pembayaran gaji PTT dan THL pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		182,642,893	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000	
216 01 2.09 04	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								89,050,480				150,000,000	

## Program dan Kegiatan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
216 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun dan terpenuhinya pembayaran pajak STNK kendaraan dinas/operasional		Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		57,173,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000
216 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun		Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		16,977,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000
216 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeiharanya perlengkapan gedung kantor		Kab. Banjarnegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		14,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000
216 02 2.0	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>								<b>244,911,500</b>				<b>1,812,370,800</b>
216 02 1	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>244,911,500</b>				<b>1,812,370,800</b>
216 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Percentase pengelolaan website banjarnegarakab.go.id, media sosial dan aplikasi pelaporan/aduan masyarakat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		25,083,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,882,400
216 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Tersedianya baliho sosialisasi kemasyarakatan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua		1 kegiatan		23,474,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			355,568,300

## Program dan Kegiatan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
					Kelurahan					Umum				
216 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi dengan masyarakat yang dikelola		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 jenis		154,387,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			451,747,900	
216 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah dokumen jaringan komunikasi dan informasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 dokumen		3,105,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000	
216 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media		Terselenggaranya jumpa pers dan iklan di media massa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kegiatan		28,409,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			379,172,200	
216 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kegiatan		10,452,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			250,000,000	
216 03 2.0	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>								<b>1,643,679,600</b>				<b>2,968,480,800</b>	
216 03 1	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>1,158,860,000</b>				<b>1,500,000,000</b>	
216 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Prosentase terpenuhinya fasilitasi jaringan e government, sistem berbasis online dan fasilitas umum		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		1,158,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,500,000,000	

## Program dan Kegiatan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
216 03 2.0 2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								484,819,600				1,468,480,800	
216 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase kajian dan pengawasan menara yang dilaksanakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		10,602,100	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum			109,150,100	
216 03 2.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Tersedianya dokumen kebijakan SPBE		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		56,063,000	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum			221,573,000	
216 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Tersedia lisensi layanan penunjang (support TNDE, basis data IBM Domino, Linux Redhat Enterprises, Sophos, IP Publik, aplikasi zoom)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen		236,725,000	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum			430,892,200	
216 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Pembuatan command center dan jumlah titik jaringan yang dapat dikembangkan dan dipelihara		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 kegiatan		181,429,500	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum			706,865,500	
220	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>								46,373,900				182,132,000	
220 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>								46,373,900				182,132,000	
220 02 2.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								46,373,900				182,132,000	

## Program dan Kegiatan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, <small>Pengolahan, Analisis</small> dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah aplikasi statistik sektoral yang tersedia	Semua Keluaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 aplikasi	3 jenis data		46,373,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			182,132,000
2 21	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>								24,000,000				230,740,200
2 21 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>								24,000,000				230,740,200
2 21 02 2.01 1	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								24,000,000				230,740,200
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah <small>Kabupaten/Kota</small> Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah alat persandian dan komunikasi yang sesuai perkembangan teknologi	Semua Keluaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 set			24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			230,740,200
<b>TOTAL</b>									<b>5,615,818,000</b>				<b>9,440,723,800</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

#### **4.1 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

##### a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program informasi dan komunikasi publik terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 6 sub kegiatan yaitu Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik; Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Pelayanan Informasi Publik; Layanan Hubungan Media; Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

##### b. Program Aplikasi Informatika

Program aplikasi informatika terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 5 sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah; Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

## **4.2 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program penyelenggaraan statistik sektoral terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

## **4.3 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

## **BAB V** **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas komunikasi dan Informatika Tahun 2022 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022. Renja Dinas komunikasi dan Informatika selanjutnya menjadi platform operasional bagi Dinas komunikasi dan Informatika dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2017-2022. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Dinas komunikasi dan Informatika digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas komunikasi dan Informatika setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Dinas komunikasi dan Informatika masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Dinas komunikasi dan Informatika menjadi acuan bagi Kepala Dinas komunikasi dan Informatika dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal : 14 September 2021

